



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 yang merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan dicapai selama Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar pedoman dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025.

Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini mampu dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu, masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat dijadikan arah di dalam melaksanakan seluruh Program/Kegiatan serta mampu memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Jambi, Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002



| | Halaman |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 4 |
| II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2025 | 5 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA 2025 dan Capaian Prioritas RENSTRA DLH Prov. Jambi | 5 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 46 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 47 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 50 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 72 |
| III TUJUAN DAN SASARAN | 73 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 73 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran | 78 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 82 |
| IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 94 |
| V PENUTUP | 105 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RENJA PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). RENJA SKPD memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jambi serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atau disebut DLH Provinsi Jambi yang berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Serta dijabarkan uraian tugasnya dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi memiliki tugas sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, perlu merumuskan dan menyusun Rencana Kerja SKPD guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang berbasis pada pelestarian kualitas dan fungsi lingkungan hidup. Renja SKPD sebagaimana dimaksud

merupakan hasil Musrenbang Provinsi Jambi, serta hasil pembahasan usulan program dan kegiatan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang disinergikan dengan mengacu pada program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dan merupakan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra DLH Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Provinsi Jambi, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2025 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

- A. BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2025 dan urgensi terhadap penyusunannya yang terdiri dari :
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DLH TAHUN 2025, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan capaian prioritas dan target program Renstra DLH Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2025 serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Jambi.

- C. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja DLH Provinsi Jambi tahun 2025.
- D. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN, memuat program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
- E. BAB V PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja DLH Provinsi Jambi Tahun 2025.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2025****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN PRIORITAS RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2025

- Dana APBD adalah sebesar Rp21.295.242.751,- (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung **Rp15.797.145.829,-**
 - Belanja Pegawai Rp15.797.145.829,-
 - b. Belanja Langsung **Rp5.498.096.922,-**
 - Belanja Operasi Rp5.498.096.922,-
 - Belanja Modal Rp0,-
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2025 tidak memperoleh Dana Dekonsentrasi/APBN.

2. Realisasi Anggaran pada per 31 Maret 2025

Realisasi Anggaran Dana APBD adalah sebesar Rp3.607.567.598,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 16,94% dengan sisa dana sebesar Rp17.687.675.153,- (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Rincian realisasi sbb :

- a. Belanja Tidak Langsung **Rp3.271.502.211,- (20,71%)**
 - Belanja Pegawai Rp3.271.502.211,-,-
- b. Belanja Langsung **Rp336.065.387,- (6,11%)**
 - Belanja Operasi Rp336.065.387,-
 - Belanja Modal Rp0,-

APBD Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 bidang lingkungan hidup tersebut dialokasikan untuk mendanai 9 Program (1 program non urusan dan 8 program urusan) dan 15 kegiatan (6 kegiatan non urusan dan 9 kegiatan urusan) serta 38 subkegiatan (21 subkegiatan non urusan dan 17 subkegiatan urusan). Serapan anggaran dari 38 subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 bervariasi satu sama lainnya, hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan berbeda-beda. Selain mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi, pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi juga menghasilkan dana pendapatan sebagai Penerimaan Asli Daerah yang bersumber dari Jasa Analisa Sampel Laboratorium DLH Provinsi Jambi. Target penerimaan retribusi jasa laboratorium Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.500.000.000,- dan realisasi per 31 Maret 2025 sebesar Rp279.724.000,-.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi s.d Triwulan I TA 2025 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DLH TA 2025
s.d TRIWULAN I

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| A | Pendapatan | 2.500.000.000,- | 279.724.000,- | 27,97 |
| B | Belanja | 21.295.242.751,- | 3.607.567.598,- | 16,94 |
| | 1. Belanja tidak Langsung | 15.797.145.829,- | 3.271.502.211,- | 20,71 |
| | 2. Belanja Langsung | 5.498.096.922,- | 336.065.387,- | 6,11 |
| C | Surplus / (Defisit) | (17.688.724.081,-) | (2.829.666.627,-) | 16,00 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DLH Provinsi Jambi, Maret 2025

Berikut ini dijabarkan uraian program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD serta anggaran dan realisasinya.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

Tabel 1
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2025 s.d Triwulan I

| No | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | KINERJA | | | ANGGARAN | | | | SISA ANGGARAN |
|-----|---|--|------------------|---------|----|-------|----------------|---------------|-------|---------|----------------|
| | | | | T | R | % | T | R | % KEU | % FISIK | |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | | (5) | | | | (6) |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 21.295.242.751 | 3.607.567.598 | 16,94 | 16,94 | 14.829.874.887 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 21.295.242.751 | 3.607.567.598 | 16,94 | 16,94 | 14.829.874.887 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat AKIP Perangkat Daerah | | BB | BB | 100 | 18.229.242.751 | 3.499.792.398 | 22,59 | 22,59 | 12.844.495.296 |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | laporan/ dokumen | 25 | 12 | 48,00 | 145.000.000 | 40.342.900 | 27,82 | 27,82 | 104.657.100 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 4 | 3 | 75,00 | 80.363.100 | 37.567.900 | 46,75 | 46,75 | 42.795.200 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 33,33 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 33,33 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 33,33 | 3.000.000 | 2.775.000 | 92,50 | 92,50 | 225.000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 33,33 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 6 | 4 | 66,67 | 40.615.650 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.615.650 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 3 | 1 | 33,33 | 12.021.250 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.021.250 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | laporan/ dokumen | 35 | 12 | 34,29 | 15.802.145.829 | 3.273.302.211 | 20,71 | 20,71 | 12.528.843.618 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/ bulan | 120 | 100 | 25,00 | 15.797.145.829 | 3.271.502.211 | 20,71 | 20,71 | 12.525.643.618 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 12 | 3 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 2 | 1 | 50,00 | 5.000.000 | 1.800.000 | 36,00 | 36,00 | 3.200.000 |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | dokumen | 5 | 2 | 40,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | laporan | 14 | 3 | 21,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | laporan/dokumen | 12 | 3 | 25,00 | 13.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000 |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 40 | 0 | 0,00 | 7.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | orang | 70 | 0 | 0,00 | 6.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000 |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | 100 | 25 | 25,00 | 422.452.922 | 38.575.750 | 9,13 | 9,13 | 383.877.172 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 10 | 0 | 0,00 | 24.953.530 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.953.530 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 40 | 3 | 7,50 | 75.226.160 | 30.078.650 | 39,98 | 39,98 | 45.147.510 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | orang | 1000 | 40 | 4,00 | 26.900.000 | 2.210.000 | 8,22 | 8,22 | 24.690.000 |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 12 | 3 | 25,00 | 15.718.232 | 6.287.100 | 40,00 | 40,00 | 9.431.132 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 30 | 3 | 10,00 | 279.655.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 279.655.000 |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | laporan | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | dokumen | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------|------------|----------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | laporan | 12 | 3 | 25,00 | 1.731.999.000 | 144.365.837 | 8,34 | 8,34 | 1.587.633.163 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | surat | 250 | 60 | 24,00 | 3.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | bulan | 36 | 9 | 25,00 | 490.652.600 | 48.809.462 | 9,95 | 9,95 | 441.843.138 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | bulan | 12 | 3 | 25,00 | 1.238.346.400 | 95.556.375 | 7,72 | 7,72 | 1.142.790.025 |
| I.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | unit | 126 | 5 | 3,97 | 114.145.000 | 3.205.700 | 2,81 | 2,81 | 110.939.300 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 9 | 5 | 55,56 | 94.020.000 | 3.205.700 | 3,41 | 3,41 | 90.814.300 |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 92 | 0 | 0,00 | 20.125.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.125.000 |
| II | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | % | 100 | 0 | 0,00 | 90.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|
| II.2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | dokumen | 2 | 0 | 0,00 | 90.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000 |
| 1 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | dokumen | 1 | 0 | 0,00 | 90.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000 |
| III | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air (IKA) | poin | IKA : 61,49 | | | 1.200.000.000 | 95.581.000 | 7,97 | 7,97 | 1.104.419.000 |
| | Indeks Kualitas Udara (IKU) | IKU : 84,72 | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | IKAL : 79,14 | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | IKEG : 75,39 | | | | | | | | | |
| III.1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | titik | 94 | 15 | 15,96 | 1.100.000.000 | 95.581.000 | 8,69 | 8,69 | 1.004.419.000 |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | dokumen | 6 | 1 | 16,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | dokumen | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | lokasi | 6 (2 kali) | 6 (1 kali) | 50,00 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000 |
| 4 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | dokumen | 480 | | | 1.000.000.000 | 95.581.000 | 9,56 | 9,56 | 904.419.000 |
| III.2 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | lokasi | 10 | 0 | 0,00 | 100.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000 |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | dokumen | 12 | 3 | 25,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------------|------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------------|-------------|--------------------|
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | kegiatan | 4 | 1 | 25,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | % | 100 | 0 | 0,00 | 250.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000 |
| V.1 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | perusahaan | 5 | 0 | 0,00 | 250.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------------|------------|----------|-------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | dokumen | 22 | 3 | 13,64 | 250.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000 |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | % | 79% | 0 | 0,00 | 1.041.000.000 | 9.530.000 | 0,92 | 0,92 | 1.031.470.000 |
| VI.1 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | usaha/kegiatan | 75 | | | 1.041.000.000 | 9.530.000 | 0,92 | 0,92 | 1.031.470.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------|------------|----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | dokumen | 20 | | | 526.000.000 | 5.300.000 | 1,01 | 1,01 | 520.700.000 |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | orang | 15 | 36 | 100 | 5.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 |
| 3 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | badan usaha | 75 | | | 500.000.000 | 4.230.000 | 0,85 | 0,85 | 495.770.000 |
| 4 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | orang | 11 | 0 | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 |
| VII | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 64,28% | 93% | 0 | 0,00 | 210.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-------------|----|---|------|-------------|---|------|------|-------------|
| VII.2 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | kelembagaan | 39 | 0 | 0,00 | 210.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210.000.000 |
| 1 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | dokumen | 39 | 0 | 0,00 | 210.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 210.000.000 |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | % | 80 | 0 | 0,00 | 70.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000 |
| VIII.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | kali | 5 | 0 | 0,00 | 70.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|------------|------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | dokumen | 5 | 0 | 0,00 | 70.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000 |
| X | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | % | 100 | 100 | 100,00 | 155.000.000 | 2.664.200 | 1,72 | 1,72 | 152.335.800 |
| X.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | kasus | 18 | 7 | 38,89 | 155.000.000 | 2.664.200 | 1,72 | 1,72 | 152.335.800 |
| | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | kasus | 25 | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani | pengaduan | 18 | 7 | 38,89 | 75.000.000 | 1.740.000 | 2,32 | 2,32 | 73.260.000 |
| 2 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | perkara | 25 | | | 70.000.000 | 181.200 | 0,26 | 0,26 | 69.818.800 |
| 3 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | perkara | 12 | 2 | 16,67 | 5.000.000 | 743.000 | 14,86 | 14,86 | 4.257.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|------------|---|------|------------|---|------|------|------------|
| 4 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | perkara | 4 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 |
| XI | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | % | 30 | 0 | 0,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 |
| | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | | 70 | 0 | 0,00 | | | | | |
| XI.1 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | ton/tahun | 224.982,86 | 0 | 0,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 |
| | | Jumlah penanganan sampah secara regional | | 524.960,00 | 0 | 0,00 | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | dokumen | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | ton | 524.960,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | dokumen | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------|----|---|------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 6 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | dokumen | 11 | 0 | 0,00 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 21.295.242.751 | 3.607.567.598 | 16,94 | 16,94 | 17.687.675.153 |

Sumber : SIPD Penatausahaan, 2025

Penjabaran dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan sebagai berikut :

PROGRAM NON URUSAN

Program non urusan (rutin) terdiri dari 1 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini dijabarkan menjadi 6 kegiatan dan 21 subkegiatan (termasuk penyediaan gaji dan tunjangan). Total anggaran untuk 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah ini sebesar Rp18.229.242.751,- dan terealisasi sebesar Rp3.499.792.398,- (19,20%). Sebagian besar output kegiatan dan subkegiatan telah dilaksanakan hampir 100% untuk target triwulan 1. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi.

Faktor pendukung pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Dokumen perencanaan yang lengkap
2. Dukungan fasilitas kerja, teknologi dan logistik yang memadai
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah dan dengan pemerintah pusat
4. Peraturan kepala daerah dan kebijakan teknis pendukung sudah ditetapkan
5. Pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), seperti e-planning dan e-budgeting.
6. Pelaporan dan evaluasi program secara digital untuk efisiensi.

Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Dana belum tersedia karena menunggu proses pergeseran anggaran
2. Gangguan teknis menyebabkan keterlambatan input dan pelaporan data
3. Mutasi atau rotasi pegawai yang menyebabkan adaptasi ulang di awal tahun

Solusi untuk permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Mempercepat proses pencairan
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan pembaruan sistem secara berkala
3. Melakukan pelatihan internal dan rotasi berbasis kompetensi

PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ada 8 program. Capaian Kinerja Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup merupakan bagian awal dari kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program perencanaan lingkungan hidup bertujuan untuk mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup. Instrumen yang relevan dengan hal ini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Anggaran program ini untuk tahun 2025 sebesar Rp90.000.000,-, dan belum terealisasi. Outputnya juga belum ada, masih 0%.

Faktor pendukung pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Keterlibatan aktif Bappeda, DLH dan OPD Teknis
2. Adanya tim pelaksana KLHS yang sudah dibentuk dan tersedianya tenaga ahli multidiplin (lingkungan, tata ruang, sosial dan hukum)

Faktor penghambat pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Keterlambatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan KLHS
2. Anggaran KLHS belum dianggarkan secara optimal dalam APBD
3. Data daya dukung dan daya tampung lingkungan belum lengkap atau tidak mutakhir
4. Sulitnya akses data dari sektor atau instansi lain

Solusi untuk faktor penghambat program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Manfaatkan dokumen perencanaan tahun sebelumnya sebagai basis awal analisis
2. Mengajukan dukungan pembiayaan melalui kerja sama donor (hibah *green climate fund/* GCF)
3. Bangun sistem basis data lingkungan daerah secara digital dan terintegrasi lintas sektor
4. Jalin kerja sama dengan instansi vertikal dan perguruan tinggi untuk akses data.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sangat beralasan karena indikator program (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode RENSTRA 2021-2026 adalah tersajinya data kondisi kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi secara keseluruhan yang meliputi aspek kualitas air, udara, air laut dan ekosistem gambut.

Program ini pada tahun 2025 disiapkan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp95.581.000,- atau sebesar 7,97%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian indeks kualitas air (IKA) dan indek kualitas udara (IKU) Provinsi Jambi Tahun 2025, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota

Faktor pendukung program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Laboratorium uji lingkungan (air, udara, tanah) tersedia dan berfungsi baik
2. Alat pemantau kualitas lingkungan terpasang dan aktif
3. Data lingkungan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

Faktor penghambat program kegiatan dan subkegiatan, antara lain :

1. Pengurangan anggaran untuk kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penanganan pencemaran masih minim
2. Banyak pelaku usaha tidak mematuhi baku mutu lingkungan atau tidak melaporkan dokumen lingkungan

c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 memiliki anggaran sebesar Rp50.000.000,- Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

- Jumlah dunia usaha/ kegiatan yang dibina terkait pengelolaan B3 dan LB3 sebanyak 6 perusahaan.
- Jumlah koordinasi/ pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab/kota sebanyak 4 kab./kota.

Koordinasi/pembinaan PETI yang menggunakan B3 terhadap kab./kota dilaksanakan di 5 kab./kota, yaitu : Kab. Tebo, Kab. Bungo, Kab. Sarolangun, Kab. Merangin, dan Kab. Tanjung Jabung Barat.

- Pengelolaan fasilitas layanan limbah B3 medis di Kabupaten Bungo

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini kesalahan dalam penginputan rekening anggaran. Solusi untuk kendali ini adalah perubahan APBD.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Subkegiatan yang mendukung program ini yaitu

- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Binwas kinerja KPA dan instansi LH serta verifikasi lisensi KPA
2. Pemantauan kondisi rencana usaha/kegiatan
3. Pembinaan dan pemantauan izin lingkungan / RKL-RPL perusahaan se-Provinsi Jambi

Kendala dalam pelaksanaan subkegiatan ini adalah adanya peraturan baru tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan subkegiatan mengalami perubahan.

- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi pelaksanaan pelatihan pengembangan kapasitas PPLH se-Provinsi Jambi dengan target sebanyak 15 orang, dan terealisasi 36 orang.
- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, target 11 orang dan belum ada realisasi.

e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Subkegiatan yang mendukung program ini adalah Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi inventarisasi dan verifikasi data keberadaan MHA dan Kearifan Lokal di kab/kota.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025 belum ada kab/kota yang menerima pengajuan MHA dengan alasan sebagai berikut :

1. Tidak ada kejelasan dasar hukum untuk pembentukan dan pengukuhan MHA;
2. Kab./kota belum membentuk panitia pengukuhan MHA;
3. Tidak ada OPD di kab/kota yang memiliki tupoksi melakukan verifikasi dan pembinaan MHA

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat meliputi subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup terdiri dari : pembinaan Kampung Iklim, pembinaan Adiwiyata, pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru, dan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Subkegiatan yang mendukung program ini meliputi Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi, Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi dan Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi. Pelaksanaan subkegiatan ini antara lain :

1. Jumlah kasus yang masuk ke pos pengaduan Dinas LH hingga triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 7 kasus dari target 18 kasus.
2. Kegiatan penataan hukum lingkungan telah dilaksanakan terhadap berbagai usaha/kegiatan yang dapat berakibat munculnya berbagai bentuk pencemaran lingkungan, sehingga diperlukan suatu usaha untuk menata dan melakukan penegakan hukum lingkungan. Tujuan dari kegiatan ini merupakan usaha pemerintah untuk menata dan mengelola lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran baik air, udara maupun pencemaran limbah B3 serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya meliputi penegakan hukum administratif, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Pada tahun 2025 ini, jumlah rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan (penegakan hukum) dan jumlah verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan pengaduan LH sebanyak 11 perkara dan belum ada realisasi.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Target dalam Pengelolaan sampah menurut Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga : 30% Pengurangan, 70% Pengelolaan. Berdasarkan Permen PU No.03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional. Pelaksanaan subkegiatan ini meliputi :

1. Pelaksanaan FGD Jakstrada diikuti oleh 11 kab/kota sebanyak 1 kali.
2. Pembinaan kabupaten/kota terkait pengelolaan sampah,
3. Pelaksanaan sosialisasi bank sampah
4. Pembinaan Adipura untuk 4 kab./ kota yang diadakan oleh KLHK bersama DLH Provinsi Jambi secara online, yaitu Kota Jambi, Kab. Merangin, Kab. Bungo, dan Kota Sungai Penuh.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penanganan dan pengurangan sampah yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan sampah (tahap pemilahan di sumbernya).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebagian besar program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/kegiatan yang direncanakan.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, hanya 2 subkegiatan dari 40 subkegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu subkegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 ini tidak ada kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

➤ Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

- ❖ Pergantian pejabat struktural di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang menyebabkan revisi Surat Keputusan untuk menjalankan program/kegiatan.
- ❖ Kendala dalam perubahan sistem aplikasi pencairan dan perubahan mekanisme pencairan dari tunai menjadi non tunai.
- ❖ Kendala adanya kesalahan dalam penganggaran sehingga menunggu pergeseran APBD.

➤ Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

- ❖ Komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup DLH Provinsi Jambi untuk merealisasikan target output dan outcomes dengan dukungan anggaran.
- ❖ Terlaksananya evaluasi dan pengendalian kegiatan dari pimpinan kepada bawahan lingkup DLH Provinsi Jambi.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, antara lain :

- Terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Perubahan dan pergeseran APBD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- Selalu mengupayakan adanya koordinasi dan komunikasi secara intensif antar semua komponen di Dinas Lingkungan Hidup dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.
- Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM agar lebih kompeten sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian output dan outcomes.
- Atasan langsung memantau/memonitor perkembangan kegiatan dan pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran kegiatannya dengan membuat agenda kerja untuk setiap pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.

Adapun secara lebih rinci terkait dengan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja 2025 dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023 tertuang dalam Tabel 3.

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TABEL 3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA DLH PROVINSI JAMBI S/D TAHUN 2025

| Kode | Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026) | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)(2025) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun n-1) (2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun Berjalan 2025 | |
|-------------------|---|--|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Target Renja OPD Tahun 2024 | Realisasi Renja OPD Tahun 2024 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)* | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B (65) | B (65) | B (69,95) | B (63,5) | BB (78,75) | 124,02% | B (64) | BB (78,75) | 100% |
| 2.11.01.1.01 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | 123 | laporan/ dokumen | 16 | 24 | 24 | 100% | 25 | 65 | 53% |
| 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 | dokumen | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 60% |
| 2.11.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15 | dokumen | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 60% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 2.11.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 15 | dokumen | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 60% |
| 2.11.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 15 | dokumen | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 60% |
| 2.11.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 15 | dokumen | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 9 | 60% |
| 2.11.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 | laporan | 7 | 6 | 6 | 100% | 6 | 19 | 63% |
| 2.11.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 | laporan | 1 | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 46% |
| 2.11.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 175 | laporan/ dokumen | 35 | 35 | 35 | 100% | 35 | 105 | 60% |
| 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 | orang/ bulan | 101 | 103 orang (14 bulan) | 103 orang (14 bulan) | 100% | 115 | 115 | 96% |
| 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 24 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 laporan | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 60% |
| 2.11.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 25 dokumen | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 15 | 60% |
| 2.11.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 70 laporan | 14 | 14 | 14 | 100% | 14 | 42 | 60% |
| 2.11.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 150 orang | 28 | 51 | 49 | 96,08% | 160 | 160 | 107% |
| 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 680 - | 0 | 0 | 0 | 0% | 175 | 175 | 26% |
| 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 orang | 28 | 21 | 19 | 90% | 4 | 51 | 268% |
| 2.11.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 175 orang | 0 | 30 | 30 | 100% | 35 | 65 | 37% |
| 2.11.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 310 orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 65 | 0 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 50 | paket | 4 | 6 | 6 | 100% | 10 | 20 | 40% |
| 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 195 | paket | 2 | 5 | 5 | 100% | 40 | 47 | 24% |
| 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4800 | orang | 850 | 700 | 855 | 1 | 1000 | 2705 | 56% |
| 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | paket | 12 | 4 | 4 | 100% | 12 | 28 | 47% |
| 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 | dokumen | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
| 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 610 | laporan | 21 | 200 | 53 | 27% | 200 | 274 | 45% |
| 2.11.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 16 | laporan | 2 | 3 | 3 | 100% | 3 | 8 | 50% |
| 2.11.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 9 | dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 33% |
| 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 132 | unit | 13 | 23 | 22 | 96% | 27 | 62 | 27% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2.11.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 11 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 27% |
| 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 95 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 19 | 20% |
| 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 | unit | 9 | 23 | 22 | 96% | 4 | 35 | 175% |
| 2.11.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 | unit | 4 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 83% |
| 2.11.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 1490 | laporan | 348 | 348 | 348 | 100% | 298 | 994 | 67% |
| 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1250 | surat | 300 | 300 | 300 | 100% | 250 | 850 | 68% |
| 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 180 | bulan | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 108 | 60% |
| 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
| 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | 136 | unit | 103 | 99 | 99 | 100% | 120 | 133 | 98% |
| 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 23 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 21 | 21 | 91% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 | unit | 19 | 16 | 16 | 100% | 9 | 19 | 211% |
| 2.11.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 92 | unit | 82 | 82 | 82 | 100% | 88 | 88 | 96% |
| 2.11.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 12 | unit | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 42% |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun | 11 | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 27% |
| 2.11.02.1.01.0004 | Penyusunan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun | 3 | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 33% |
| 2.11.02.1.01.0005 | Penetapan RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan | 1 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.11.02.1.01.0006 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | 1 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | 8 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 25% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|----|--|--|------|--|----|------|
| 2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | 24 dokumen | 0 | 2 | 2 | 100% | 7 | 9 | 38% |
| 2.11.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 5 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 20% |
| 2.11.02.1.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun | 3 dokumen | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 100% |
| 2.11.02.1.02.0005 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | 3 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 dokumen (Peninjauan Kembali) | 1 | 33% |
| 2.11.02.1.02.0008 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun | 15 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 27% |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | IKA : 61,59 poin IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89 | | IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89 | IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89 | | IKU : 84,62 IKA : 61,39 IKAL : 78,49 IKEG : 74,89 | | |
| 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 94 titik | 24 | 30 | 30 | 100% | 30 | 74 | 79% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.11.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 42 | dokumen | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 86% |
| 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 30 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 20% |
| 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | 18 | lokasi | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 33,33% |
| 2.11.03.1.01.0012 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 2 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% |
| 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 21840 | dokumen | 3452 | 4200 | 1846 | 43,95% | 4680 | 9978 | 46% |
| 2.11.03.1.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | 10 | lokasi | 9 | 10 | 10 | 100% | 10 | 33 | 330% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 2.11.03.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | 60 dokumen | 2 | 2 | 2 | 100% | 12 | 16 | 27% |
| 2.11.03.1.03.0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | 22 kegiatan | 5 | 2 | 2 | 100% | 4 | 11 | 50% |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanakeragaman hayati Provinsi Jambi | 100% % | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% |
| 2.11.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | 5 dokumen (Perda/ Pergub) dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| 2.11.04.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 5 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 20% |
| 2.11.04.1.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 18,5 Ha | 0 | 0 | 0 | 0% | 18,5 | 18,5 | 100% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | 100% | % | 5 dokumen | 5 | 5 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | 6 | perusahaan | 6 | 5 | 5 | 100% | 5 | 6 | 100% |
| 2.11.05.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 | dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 20% |
| 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 109 | dokumen | 5 | 22 | 22 | 100% | 22 | 49 | 45% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|------------------------------|----|----|-------|------|----|-----|---------|
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 86% (60 % perusahaan) | 0 | 76 | 80,00 | 105% | 77 | 12 | #VALUE! |
| 2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 70 usaha/kegiatan | 19 | 13 | 35 | 269 | 70 | 25 | 36% |
| 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 20 dokumen | 27 | 13 | 20 | 154% | 25 | 83 | 415% |
| 2.11.06.1.01.0005 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 15 orang | 12 | 0 | 0 | 0% | 15 | 86% | 79% |
| 2.11.06.1.01.0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 80 badan usaha | 19 | 13 | 17 | 131% | 70 | 33 | 41% |
| 2.11.06.1.01.0007 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 33 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 11 | 33% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 100% | 64,28% (27 MHA) | 76 | 79 | 79 | 100% | 86 | 86 | 100% |
| 2.11.07.1.01 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui | 42 | MHA | 30 | 33 | 33 | 100% | 36 | 36 | 86% |
| 2.11.07.1.01.0001 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 55 | dokumen | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 24 | 44% |
| 2.11.07.1.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 42 | kelembagaan | 30 | 33 | 33 | 0 | 36 | 36 | 86% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.11.07.1.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 42 dokumen | 6 | 8 | 8 | 0 | 36 | 36 | 86% |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 80 % | 0 | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 88% |
| 2.11.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 5 kali | 0 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 2.11.08.1.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 58 dokumen | 0 | 4 | 4 | 100% | 22 | 26 | 45% |
| 2.11.08.1.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 525 orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 19% |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi | 100% % | 0% | 0 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 30 kategori | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 20% |
| 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 30 entitas | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 20% |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | 100% % | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100% |
| 2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 19 kasus | 24 | 18 | 13 | 100% | 17 | 54 | 100% |
| | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 28 kasus | 24 | 18 | 26 | 144% | 23 | 73 | 100% |
| 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | 85 pengaduan | 24 | 18 | 13 | 100% | 17 | 54 | 64% |
| 2.11.10.1.01.0003 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 133 perkara | 24 | 18 | 26 | 144% | 23 | 73 | 55% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|
| 2.11.10.1.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 37 perkara | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 27% |
| 2.11.10.1.01.0006 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 12 perkara | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 33% |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 30 % | 22,00 | 27 | 22,00 | 81,48% | 28% | 22,00 | 73% |
| | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 70 % | 68,67 | 73 | 68,67 | 94,07% | 71% | 68,67 | 98% |
| 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | 224.982,86 ton/tahun | 51.891,65 | 194.621,85 | 51.891,65 | 26,66% | 205.866,67 | 51.891,65 | 23% |
| | | Jumlah penanganan sampah secara regional | 524.960,00 ton/tahun | 161.945,53 | 518.991,60 | 161.945,53 | 31,20% | 522.019,05 | 161.945,53 | 31% |
| 2.11.11.1.01.0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | 61 dokumen | 8 | 4 | 4 | 100% | 13 | 25 | 41% |
| 2.11.11.1.01.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional | Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 3 unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 33% |
| 2.11.11.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan | 8 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 25% |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------|---|---|---|----|------------|-----------|-----|
| 2.11.11.1.01.0006 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 524.960,00 ton | 0 | 0 | 0 | 0% | 522.019,05 | 522019,05 | 99% |
| 2.11.11.1.01.0010 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | 22 dokumen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | | | | | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 pada misi 2, yaitu **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sesuai misi ke-5 RPJMD Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah terwujudnya sumber lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas udara, air, air laut, dan ekosistem gambut
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

TABEL 4
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|--|--|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 70,87 | 72,07 | 72,44 | 72,80 | 73,17 | 73,53 |
| Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut | 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 85,65 | 84,42 | 84,52 | 84,62 | 84,72 | 84,82 |
| | | 2. Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 56,75 | 61,19 | 61,29 | 61,39 | 61,49 | 61,59 |
| | | 3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Poin | 55,93 | 77,19 | 77,84 | 78,49 | 79,14 | 79,79 |
| | | 4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | Poin | 69,14 | 73,89 | 74,39 | 74,89 | 75,39 | 75,89 |
| Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik | 5. Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP) | Poin | B (61,59) | B (63,00) | B (63,50) | BB (78,80) | BB (79,00) | BB (79,25) |
| | | 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 82,83 | 83,25 | 83,50 | 83,75 | 84,00 | 84,25 |

Sumber : Rancangan Perubahan RENSTRA DLH Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, 2024

Tabel 5
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir (2026) |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 70,87 | 71,70 | 72,07 | 72,44 | 72,8 | 73,17 | 73,53 | 73,53 |
| 1. Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 85,65 | 84,31 | 84,42 | 84,52 | 84,62 | 84,72 | 84,82 | 84,82 |
| 2. Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 56,75 | 61,09 | 61,19 | 61,29 | 61,39 | 61,49 | 61,59 | 61,59 |
| 3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Poin | 55,93 | 54,62 | 77,19 | 77,84 | 78,49 | 79,17 | 79,79 | 79,79 |
| 4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | Poin | 69,14 | 73,39 | 73,89 | 74,39 | 74,89 | 75,39 | 75,89 | 75,89 |
| Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | % | 53% | 61% | 70% | 76% | 77% | 79% | 86% | 86% |
| 5. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan | usaha/kegiatan | 37 | 43 | 49 | 53 | 54 | 55 | 60 | 60 |

Sumber : Rentra DLH Provinsi Jambi, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Target setiap komponen terdiri atas :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 84,1 – 84,5
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Air 55,1 – 55,5
- c. Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan 61,6 – 65,5
- d. Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut 58,5 – 60,5

Berdasarkan rincian komponen tersebut ditetapkan target IKLH 2020-2024 yaitu 68,71-69,74.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Beban lingkungan di wilayah Provinsi Jambi dalam mendukung keberlanjutan pembangunan semakin berat. Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus-menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan ini

disebabkan beberapa isu lingkungan hidup strategis yang menonjol di wilayah Provinsi Jambi antara lain :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.
2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI;
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis khususnya limbah Covid-19
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal
4. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten terapkan.

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025 lebih dititikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya untuk

meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH dan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKLHD).
2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS Tata Ruang.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.

7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Selain itu, rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, subkegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renja DLH Provinsi Jambi senantiasa diselaraskan dengan Renstra DLH Provinsi Jambi dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perbandingan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan terdapat perbedaan yang signifikan pada program kegiatan serta target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Namun, tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi OPD. Perbedaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TABEL 6
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI JAMBI

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan | Hasil Analisis Kebutuhan | | | Catat an |
|-----|--|-------------------|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------|--|-------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B (64,5) | 22.007.550.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B (64,5) | 17.725.268.454 | |
| I.1 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | 25 laporan/ dokumen | 812.000.000 | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penggangan, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | 25 laporan/ dokumen | 91.941.500 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 450.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 64.402.600 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|-----------|-------------|---|--|-----------|------------|--|
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 dokumen | 0 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 dokumen | 0 | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 laporan | 125.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 laporan | 9.517.650 | |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 225.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 12.021.250 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 35 laporan/dokumen | 17.018.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 35 laporan/dokumen | 15.802.145.829 | |
|------------|---|----------------|--|---------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|--|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Jambi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 120 orang/bulan | 17.000.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 101 orang/bulan | 15.797.145.829 | |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 5.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 0 | |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 5.000.000 | |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 dokumen | 3.000.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 dokumen | 0 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14 laporan | 5.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14 laporan | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 150 orang | 150.050.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 orang | 12.232.000 | |
|------------|--|----------------|---|------------------|----------------------|--|---|-----------------|--------------------|--|
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 175 paket | 113.750.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 175 paket | 0 | |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Provinsi Jambi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 orang | 19.800.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 orang | 0 | |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 orang | 6.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 7.500.000 | |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Jambi | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 70 orang | 10.500.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 orang | 4.732.000 | |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 1.054.500.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 197.331.053 | |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 25.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 9.981.412 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---|----------------|----------------------|---|---|----------------|-------------|--|
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 paket | 200.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 30.090.464 | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1000 orang | 80.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 400 orang | 10.760.000 | |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 65.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 0 | |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 4.500.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 8.999.177 | |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 laporan | 450.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 137.500.000 | |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 laporan | 30.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 laporan | 0 | |
| 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 dokumen | 200.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 dokumen | 0 | |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 25 unit | 1.040.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 25 unit | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|----------------------|
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Provinsi Jambi | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 400.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 unit | 0 |
| 2 | Pengadaan Mebel | Provinsi Jambi | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 unit | 300.000.000 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 unit | 0 |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Jambi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 40.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 0 |
| 4 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Provinsi Jambi | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 300.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 0 |
| I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 298 laporan | 753.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 laporan | 1.601.818.072 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 surat | 3.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 surat | 600.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 bulan | 450.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 bulan | 398.331.672 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Provinsi Jambi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 300.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 1.202.886.400 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| I.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | 126 unit | 1.180.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | 14 unit | 19.800.000 | |
|------------|--|----------------|---|-----------------|----------------------|--|---|----------------|-------------------|--|
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Provinsi Jambi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 22 unit | 500.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0 unit | 0 | |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Provinsi Jambi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit | 500.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | 19.800.000 | |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Provinsi Jambi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 92 unit | 75.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 unit | 0 | |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Provinsi Jambi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 unit | 105.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 0 unit | 0 | |
| II | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 100 % | 2.000.000.000 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 100 % | 40.839.400 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|--|------------------|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| II.1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun | 2 dokumen | 750.000.000 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun | 0 dokumen | 0 | |
| 1 | Penyusunan RPPLH Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun | 0 dokumen | 0 | Penyusunan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun | 0 dokumen | 0 | |
| 2 | Penetapan RPPLH Provinsi | Provinsi Jambi | Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan | 1 dokumen | 250.000.000 | Penetapan RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan | 0 dokumen | 0 | |
| 3 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | 0 dokumen | 0 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | 0 dokumen | 0 | |
| 4 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | 1 dokumen | 500.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | 0 dokumen | 0 | |
| II.2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | 5 dokumen | 1.250.000.000 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | 12 dokumen | 40.839.400 | |
| 1 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 1 dokumen | 500.000.000 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 0 dokumen | 0 | |
| 2 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun | 1 dokumen | 300.000.000 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun | 1 dokumen | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|---|----------------------|--|--|---|--------------------|--|
| 3 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Provinsi Jambi | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | 1 dokumen | 250.000.000 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | 11 dokumen | 40.839.400 | |
| 4 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun | 2 dokumen | 200.000.000 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun | 0 dokumen | 0 | |
| III | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | IKA : poin 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39 | 4.575.236.000 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | IKA : poin 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39 | 884.031.287 | |
| III.1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 94 titik | 4.055.236.000 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 94 titik | 833.865.287 | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 6 dokumen | 100.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 6 dokumen | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|-------------------|--|
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 6 dokumen | 250.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 6 dokumen | 0 | |
| 3 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Provinsi Jambi | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | 6 lokasi | 355.236.000 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | 6 lokasi | 49.074.700 | |
| 4 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | 2 dokumen | 250.000.000 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | 2 dokumen | 0 | |
| 5 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 dokumen | 200.000.000 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 dokumen | 0 | |
| 6 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 4680 dokumen | 2.900.000.000 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 480 dokumen | 784.790.587 | |
| III.2 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | 10 lokasi | 520.000.000 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | 10 lokasi | 50.166.000 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|------------------|------------|--|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | 12 dokumen | 315.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | 12 dokumen | 25.077.800 | |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Provinsi Jambi | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | 4 kegiatan | 205.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | 4 kegiatan | 25.088.200 | |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi | 100 % | 500.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi | 0 % | 0 | |
| IV.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | 1 dok (Perda / Pergub) dokumen | 500.000.000 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | - dokumen | 0 | |
| 1 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 | 150.000.000 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 0 dokumen | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|---|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|-------------------|--|
| 2 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 18,5 Ha | 350.000.000 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 0,0 Ha | 0 | |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | 100 % | 165.000.000 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | 100 % | 87.984.000 | |
| V.1 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | 5 perusahaan | 165.000.000 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | 5 perusahaan | 87.984.000 | |
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Provinsi Jambi | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 dokumen | 15.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 0 dokumen | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|--------------------------------|----------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|--|
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 22 dokumen | 150.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 12 dokumen | 87.984.000 | |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 79% (55 perusahaan) | 1.365.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 79% (55 perusahaan) | 565.790.310 | |
| VI.1 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 70 usaha/kegiatan | 1.365.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 75 usaha/kegiatan | 565.790.310 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------|--|----------------------------|--------------------|--|--|----------------------------|--------------------|--|
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Provinsi Jambi | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 20 dokumen | 325.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 20 dokumen | 455.911.000 | |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Provinsi Jambi | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 15 orang | 150.000.000 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 36 orang | 2.744.600 | |
| 3 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Provinsi Jambi | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 75 badan usaha | 640.000.000 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 75 badan usaha | 102.543.410 | |
| 4 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Provinsi Jambi | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 11 dokumen | 250.000.000 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 11 dokumen | 4.591.300 | |
| VII | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 93% 64,28% (27 MHA) | 400.000.000 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 93% 64,28% (27 MHA) | 210.000.000 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---|-----------------------|--------------------|--|---|-----------------------|--------------------|
| VII.1 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui | 39 MHA | 250.000.000 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui | 31 MHA | 0 |
| 1 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 11 dokumen | 250.000.000 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 11 dokumen | 0 |
| VII.2 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 39 kelembagaan | 150.000.000 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 31 kelembagaan | 210.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|--|---------------|--------------------|---|--|---------------|-------------------|--|
| 1 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 39 dokumen | 150.000.000 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 2 dokumen | 210.000.000 | |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 80 % | 600.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 80 % | 14.357.200 | |
| VIII.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 5 kali | 600.000.000 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 5 kali | 14.357.200 | |
| 1 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 5 dokumen | 500.000.000 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 5 dokumen | 14.357.200 | |
| 2 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 125 orang | 100.000.000 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 0 orang | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| IX | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi | 100 % | 850.000.000 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi | 100 % | 0 | |
| IX.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 6 kategori | 850.000.000 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 6 kategori | 0 | |
| 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Provinsi Jambi | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 entitas | 850.000.000 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 entitas | 0 | |
| X | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | 100% % | 1.350.000.000 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | 100% % | 71.319.610 | |
| X.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 18 kasus | 1.350.000.000 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 18 kasus | 71.319.610 | |
| | | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 25 kasus | | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 11 kasus | | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|--------------|----------------------|---|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | 18 pengaduan | 450.000.000 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani | 18 pengaduan | 33.014.410 | |
| 2 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 25 perkara | 350.000.000 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 11 perkara | 34.089.700 | |
| 3 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 12 perkara | 350.000.000 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 2 perkara | 2.215.500 | |
| 4 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 4 perkara | 200.000.000 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 1 perkara | 2.000.000 | |
| XI | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 30 % | 1.200.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 30 % | 26.825.000 | |
| | | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 70 | | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 70 | | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| XI.1 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | | Jumlah pengurangan sampah secara regional | 224.98 2,86 | ton/ tahun | 1.200.000.000 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | 224.98 2,86 | ton/ tahun | 26.825.000 | |
|------|--|----------------|---|----------------|---------------|---------------|--|---|----------------|---------------|------------|--|
| | | | Jumlah penanganan sampah secara regional | 524.96 0,00 | | | | Jumlah penanganan sampah secara regional | 524.96 0,00 | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | 11 | dokumen | 300.000.000 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | 11 | dokumen | 0 | |
| 2 | Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional | Provinsi Jambi | Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 1 | unit | 400.000.000 | Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional | Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 0 | unit | 0 | |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Provinsi Jambi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan | 2 | dokumen | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan | 0 | dokumen | 0 | |
| 4 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Provinsi Jambi | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 524.960 ,00 | ton | 100.000.000 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 524.96 0,00 | ton | 0 | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---|------------|-----------------------|---|---|------------|------------|--|-----------------------|
| 5 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Provinsi Jambi | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | 11 dokumen | 150.000.000 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | 11 dokumen | 0 | | |
| 6 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Provinsi Jambi | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | 11 dokumen | 150.000.000 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | 11 dokumen | 26.825.000 | | |
| TOTAL | | | | | 35.012.786.000 | TOTAL | | | | | 19.626.415.261 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

TAGGING KEGIATAN HIBAH JSMLP BOICF ISFL PROVINSI JAMBI

| Nomor Rekening | Nama Program | Nama Kegiatan | Nama Sub Kegiatan | Kegiatan Rinci Hibah JSMLP Bio CF | 2023 | 2024 |
|-----------------|--|--|--|---|----------------------|--------------------|
| 2.11.02.1.01.01 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | 1.3.2.4. Pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi | - | - |
| 2.11.02.1.01.01 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | 1.2.3.4 Melakukan studi carbon, manfaat non carbon, (penduduk asli/ Masyarakat Hukum Adat) | - | - |
| 2.11.07.1.01.01 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA yang terkait dengan PPLH | Kordinasi, Singkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak kerarifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait RPPLH | 1.3.2.2. Pengakuan MHA di Jambi | 385.000.000 | - |
| 2.11.07.1.02.01 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH | Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 2.2.1.1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lembaga MHA kearifan lokal atau kearifan lokal dan sumberdaya tradisional | 210.000.000 | 210.000.000 |
| 2.11.07.1.02.01 | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait PPLH | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan tradisional dan Hak MHA yang terkait RPPLH | Pemberdayaan Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 1.2.3.1. Peningkatan kapasitas Untuk menerapkan safeguard (pengaman kegiatan) | 1.428.000.000 | - |
| 2.11.01.1.01.05 | Program Penunjang Urusan pemertinah daerah | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.2.1.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan | 436.000.000 | 436.000.000 |
| | | | | Total Cost (Rp) | 2.459.000.000 | 646.000.000 |

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat kabupaten yang ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Provinsi, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan lingkungan hidup sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat belum tertuang dalam rancangan awal rencana kerja karena masih akan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan social budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan lingkungan hidup ke depan, yaitu :

1. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;
2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;

Isu global yang sedang dihadapi berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga isu tersebut dikenal dengan *Triple Planetary Crisis*. Arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip tersebut sangat kuat terintegrasi ke dalam RPJPN Tahun 2025-2045 yang terdiri dari 17 goals, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator.

Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas (*Game-Changer*). Untuk penurunan intensitas emisi GRK menjadi salah satu dari 5 sasaran utama untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Sementara untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, diperlukan suatu transformasi ekonomi dengan strategi ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi "*backbone*" dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Salah satu upaya dalam penguatan perencanaan pembangunan ke depan yaitu dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat menjadi jembatan analisis dalam merumuskan skenario kebijakan yang lebih tepat dan akurat dalam RPJPN/RPJPD, yang mana hasil dari KLHS memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) untuk beberapa bidang prioritas di dalam penyusunan RPJPN/RPJPD. Perencanaan lingkungan di daerah perlu selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan penyusunan KLHS RPJMD yang mengakomodir prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup di daerah, alokasi anggaran terbesar yakni pada sub bidang persampahan dengan persentase lebih dari 50% total anggaran urusan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah adalah minimnya pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi daerah dan sumber-sumber pendanaan di luar APBD untuk dapat mendukung pengelolaan sampah yang baik di daerah.

Kebijakan Nasional bidang Lingkungan Hidup melalui Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjabarkan bahwa visi dan misi bidang Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2020-2024 adalah Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 memiliki empat pilar agenda kerja yaitu:

- Lingkungan Hidup dan Hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim (lingkungan)
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi)
- Fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial)
- Tata Kelola dan Inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing (tata Kelola).

Untuk pilar lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di angka 75 -78 yang pada tahun sebelumnya (2018) berada di angka 71,67;
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor menjadi 27% dari 24,7% pada tahun 2017;
- Penurunan laju deforestasi 0,31 juta hektar per tahun dari 0,44 juta hektar pada tahun 2018;
- Indeks Kinerja Pengelolaan sampah sebesar 80;
- Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk meningkatkan dukungan terhadap Ketahanan Pangan dan ketangguhan Bencana sebanyak 108 DAS serta rehabilitasi seluas 1,5 juta Ha;
- Perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung pembangunan nasional.

Pada pilar ekonomi termasuk pengembangan 15 kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata nasional, sedangkan pada pilar tata kelola KLHK akan merencanakan memperkuat kualitas kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan diterapkan untuk diintegrasikan secara nyata dalam agenda kerja pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Selain itu sasaran tata kelola ditujukan untuk peningkatan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan, penyelesaian 263 kasus bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta peningkatan PNPB, selain itu integrasi satu sistem data dan informasi yang valid dan mudah untuk diakses. Pilar tata Kelola juga termasuk 100 produk hasil Litbang yang inovatif dan

implementatif, selain itu peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik serta penguatan SDM aparatur KLHK.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan Tahun 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Oleh karena itu, RKP Tahun 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan RKP 2025, antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju; mengurangi kemiskinan menuju nol persen; menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain

pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7–8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379–0,382 pada tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial.

RKP Tahun 2025 juga berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen. Hal ini akan dicapai melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan rancangan RKP 2025 ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. Pembangunan SDM, sosial dan budaya
2. Pembangunan ekonomi
3. Pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar serta komunikasi dan informasi
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah dan Trantibum

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut di atas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu **“Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana”** dengan fokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (26,8% - 27,1%). Strategi pembangunan yang dilakukan terkait hal tersebut dengan meningkatkan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”**. Rencana penetapan tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam Prioritas-Prioritas Pembangunan Daerah yang nantinya dijadikan

sebagai dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 serta diimplementasikan ke dalam APBD Tahun 2025. Adapun yang menjadi isu strategis Provinsi Jambi tahun 2025 antara lain :

1. Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan
2. Daya saing daerah
3. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan melalui Prioritas RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Adapun yang menjadi Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan produktivitas daerah
2. Pembangunan sosial budaya
3. Peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Meningkatkan kolaborasi dalam pengurangan resiko bencana dan mitigasi bencana
 - Mendorong implementasi perhutanan social lebih diperluas
 - Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Meningkatkan kerjasama dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
5. Tata kelola pemerintah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan visi Pemerintahan Provinsi Jambi periode 2021-2026 adalah “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP)“, maka disusunlah misi pembangunan Provinsi Jambi yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran, yaitu :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.

Misi pembangunan yang selaras dengan urusan bidang Lingkungan Hidup adalah misi ke-2.

Tujuan berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi periode 2021-2026 dan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu :

➤ **Tujuan 1** *“Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

➤ **Tujuan 2** *“Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik”*

Indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua), yaitu :

➤ **Sasaran 1** *“Meningkatnya kualitas udara, air, dan air laut serta ekosistem gambut”*

Indikator Kinerja Sasaran terdiri dari :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Air laut (IKAL)
4. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Untuk data realisasi IKAL dan IKEG ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

➤ **Sasaran 2** *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik”*

Indikator Kinerja Sasaran yaitu Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah atau opsi Nilai AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024

| Misi | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran | | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2020) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Poin | 70,87 | 72,07 | 72,44 | 72,8 | 73,17 | 73,53 |
| Pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim. | Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut | 1. | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Poin | 85,65 | 84,42 | 84,52 | 84,62 | 84,72 | 84,82 |
| | | | 2. | Indeks Kualitas Air (IKA) | Poin | 56,75 | 61,19 | 61,29 | 61,39 | 61,49 | 61,59 |
| | | | 3. | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | Poin | 55,93 | 77,19 | 77,84 | 78,49 | 79,14 | 79,79 |
| | | | 4. | Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | Poin | 69,14 | 73,89 | 74,39 | 74,89 | 75,39 | 75,89 |
| Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik | 5. | Predikat AKIP Perangkat Daerah (opsi Nilai AKIP) | Poin | B (61,59) | B (63,00) | B (63,50) | BB (78,80) | BB (79,00) | BB (79,25) | |
| | | 6. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Poin | 82,83 | 83,25 | 83,50 | 83,75 | 84,00 | 84,25 | |

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) RPJMN 2020-2024 terdiri dari 5 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola lingkungan yang meliputi Penyusunan dan Penetapan RPPLH, Penerapan RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, Peninjauan kembali RPPLH Provinsi Jambi, Pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi, penetapan baku mutu kelas air level Provinsi, penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (PPRKD) serta penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DPKLHD).

2. Penerapan instrumen lingkungan dalam menjaga kualitas lingkungan yang meliputi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi, Penyusunan KLHS Tata Ruang, Penyusunan KLHS KRP dan Peninjauan kembali RZWP3K Provinsi Jambi.
3. Peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan, meliputi pemantauan kualitas udara ambien, air sungai, danau, air laut, ekosistem gambut, koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor LH, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, identifikasi lahan bekas terbakar dan lahan gambut, dan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian LB3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Pengelolaan sampah sesuai dengan Jakstrada Provinsi Jambi dan Sosialisasi penerapan TPS3R, meliputi penyusunan rencana pengelolaan sampah Regional, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional, dan penyusunan dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional.
5. Penegakan hukum lingkungan hidup, meliputi fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH, pengawasan usaha/kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, peningkatan kapasitas PPLHD di Provinsi Jambi, dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan LH melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
6. Peningkatan peran serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan SDA dan LH, meliputi pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA; peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH; pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya LH; dan penyuluhan dan kampanye LH; Pembinaan dan penilaian ADIPURA, Kalpataru, Kampung Iklim, Adiwiyata, dan PROPER.
7. Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan dunia usaha/kegiatan meliputi pelayanan pemberian rekomendasi persetujuan lingkungan, pelayanan pos pengaduan lingkungan serta pendayagunaan laboratorium lingkungan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup perlu menaikkan anggarannya agar upaya pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih baik lagi. Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar Rp21.295.242.751,- dengan target Pendapatan Asli Daerah Rp9.500.000.000,-.

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil untuk pencapaian target yang telah ditetapkan DLH Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2025
- b. Menyusun tahapan kegiatan/anggaran
- c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Rencana kerja (program/kegiatan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 seperti tercantum dalam Tabel 8 berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

**TABEL 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 BESERTA PROYEKSI MAJU TAHUN 2026
PROVINSI JAMBI**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Lokasi | Rencana Tahun 2025 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp juta) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp juta) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | (7) | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat AKIP Perangkat Daerah | | BB | 17.725.268.454 | | | BB | 22.017.300.000 |
| 2.11.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | | 25 laporan/ dokumen | 91.941.500 | | | 25 laporan/ dokumen | 812.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Provinsi Jambi | 4 dokumen | 64.402.600 | APBD | | 4 dokumen | 450.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Provinsi Jambi | 3 dokumen | 3.000.000 | APBD | | 3 dokumen | 3.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|----------------------------|-----------------------|------|--|----------------------------|-----------------------|
| 2.11.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Provinsi Jambi | 3 dokumen | 0 | APBD | | 3 dokumen | 3.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Provinsi Jambi | 3 dokumen | 3.000.000 | APBD | | 3 dokumen | 3.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Provinsi Jambi | 3 dokumen | 0 | APBD | | 3 dokumen | 3.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Provinsi Jambi | 6 laporan | 9.517.650 | APBD | | 6 laporan | 125.000.000 |
| 2.11.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi Jambi | 3 laporan | 12.021.250 | APBD | | 3 laporan | 225.000.000 |
| 2.11.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | | 35 laporan/ dokumen | 15.802.145.829 | | | 35 laporan/ dokumen | 17.018.000.000 |
| 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Provinsi Jambi | 101 orang/ bulan | 15.797.145.829 | APBD | | 120 orang/ bulan | 17.000.000.000 |
| 2.11.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Provinsi Jambi | 12 dokumen | 0 | APBD | | 12 dokumen | 5.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------|----------------------------|-------------------|------|--|----------------------------|--------------------|
| 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Provinsi Jambi | 2 laporan | 5.000.000 | APBD | | 2 laporan | 5.000.000 |
| 2.11.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Provinsi Jambi | 5 dokumen | 0 | APBD | | 5 dokumen | 3.000.000 |
| 2.11.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Provinsi Jambi | 14 laporan | 0 | APBD | | 14 laporan | 5.000.000 |
| 2.11.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | 12 laporan/ dokumen | 12.232.000 | | | 12 laporan/ dokumen | 154.800.000 |
| 2.11.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Provinsi Jambi | 175 paket | 0 | APBD | | 180 paket | 117.000.000 |
| 2.11.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Provinsi Jambi | 5 orang | 0 | APBD | | 5 orang | 19.800.000 |
| 2.11.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Jambi | 50 orang | 7.500.000 | APBD | | 45 orang | 6.750.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------------|--------------|--------------------|------|--|--------------|----------------------|
| 2.11.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Provinsi Jambi | 40 orang | 4.732.000 | APBD | | 75 orang | 11.250.000 |
| 2.11.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 % | 197.331.053 | | | 100 % | 1.059.500.000 |
| 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Provinsi Jambi | 4 paket | 9.981.412 | APBD | | 10 paket | 25.000.000 |
| 2.11.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Provinsi Jambi | 3 paket | 30.090.464 | APBD | | 40 paket | 200.000.000 |
| 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Provinsi Jambi | 400 orang | 10.760.000 | APBD | | 1000 orang | 80.000.000 |
| 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Provinsi Jambi | 12 paket | 0 | APBD | | 12 paket | 65.000.000 |
| 2.11.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Provinsi Jambi | 12 dokumen | 8.999.177 | APBD | | 12 dokumen | 4.500.000 |
| 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Provinsi Jambi | 12 laporan | 137.500.000 | APBD | | 30 laporan | 450.000.000 |
| 2.11.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Provinsi Jambi | 4 laporan | 0 | APBD | | 4 laporan | 35.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|----------------------------|----------------------|------|--|----------------------------|----------------------|
| 2.11.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Provinsi Jambi | 2 dokumen | 0 | APBD | | 2 dokumen | 200.000.000 |
| 2.11.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 25 unit | 0 | | | 25 unit | 1.040.000.000 |
| 2.11.01.1.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Provinsi Jambi | 1 unit | 0 | APBD | | 1 unit | 400.000.000 |
| 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Provinsi Jambi | 19 unit | 0 | APBD | | 19 unit | 300.000.000 |
| 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Provinsi Jambi | 4 unit | 0 | APBD | | 4 unit | 40.000.000 |
| 2.11.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Provinsi Jambi | 1 unit | 0 | APBD | | 1 unit | 300.000.000 |
| 2.11.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan/ dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | 12 laporan/ dokumen | 1.601.818.072 | | | 12 laporan/ dokumen | 753.000.000 |
| 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Provinsi Jambi | 60 surat | 600.000 | APBD | | 250 surat | 3.000.000 |
| 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Provinsi Jambi | 36 bulan | 398.331.672 | APBD | | 36 bulan | 450.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|----------------|-------------------|------|--|-----------------|----------------------|
| 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Provinsi Jambi | 12 bulan | 1.202.886.400 | APBD | | 12 bulan | 300.000.000 |
| 2.11.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | | 14 unit | 19.800.000 | | | 127 unit | 1.180.000.000 |
| 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Provinsi Jambi | 0 unit | 0 | APBD | | 23 unit | 500.000.000 |
| 2.11.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Provinsi Jambi | 14 unit | 19.800.000 | APBD | | 9 unit | 500.000.000 |
| 2.11.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Provinsi Jambi | 0 unit | 0 | APBD | | 92 unit | 75.000.000 |
| 2.11.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Provinsi Jambi | 0 unit | 0 | APBD | | 3 unit | 105.000.000 |
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | | 100 % | 40.839.400 | | | 100 % | 2.800.000.000 |
| 2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun | | 0 dokumen | 0 | | | 2 dokumen | 500.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------------|------|--|------------------|----------------------|
| 2.11.02.1.01.0004 | Penyusunan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 0 dokumen | 0 |
| 2.11.02.1.01.0005 | Penetapan RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 0 dokumen | 0 |
| 2.11.02.1.01.0006 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 1 dokumen | 250.000.000 |
| 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 1 dokumen | 250.000.000 |
| 2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | | 12 dokumen | 40.839.400 | | | 5 dokumen | 2.300.000.000 |
| 2.11.02.1.02.0007 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 1 dokumen | 500.000.000 |
| 2.11.02.1.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun | Provinsi Jambi | 1 dokumen | 0 | APBD | | 1 dokumen | 600.000.000 |
| 2.11.02.1.02.0005 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | Provinsi Jambi | 11 dokumen | 40.839.400 | APBD | | 1 dokumen | 400.000.000 |
| 2.11.02.1.02.0008 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 2 dokumen | 800.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|--|--------------|--------------------|------|--|--|--------------|----------------------|
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | | IKA : 61,49 IKU : 84,72 IKAL : 79,14 IKEG : 75,39 | poin | 884.031.287 | | | IKA : 61,59 IKU : 84,82 IKAL : 79,79 IKEG : 75,89 | poin | 4.575.236.000 |
| 2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | | 94 | titik | 833.865.287 | | | 94 | titik | 4.055.236.000 |
| 2.11.03.1.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Provinsi Jambi | 6 | dokumen | 0 | APBD | | 6 | dokumen | 100.000.000 |
| 2.11.03.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | Provinsi Jambi | 6 | dokumen | 0 | APBD | | 6 | dokumen | 250.000.000 |
| 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | Provinsi Jambi | 6 | lokasi | 49.074.700 | APBD | | 6 | lokasi | 355.236.000 |
| 2.11.03.1.01.0010 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | Provinsi Jambi | 2 | dokumen | 0 | APBD | | 2 | dokumen | 250.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------|------|--|---------------------------|--------------------|
| 2.11.03.1.01.0012 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | Provinsi Jambi | 1 dokumen | 0 | APBD | | 1 dokumen | 200.000.000 |
| 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | Provinsi Jambi | 480 dokumen | 784.790.587 | APBD | | 5040 dokumen | 2.900.000.000 |
| 2.11.03.1.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | | 10 lokasi | 50.166.000 | | | 10 lokasi | 520.000.000 |
| 2.11.03.1.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | Provinsi Jambi | 12 dokumen | 25.077.800 | APBD | | 12 dokumen | 315.000.000 |
| 2.11.03.1.03.0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | Provinsi Jambi | 4 kegiatan | 25.088.200 | APBD | | 6 kegiatan | 205.000.000 |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi | | 0 % | 0 | | | 100% % | 500.000.000 |
| 2.11.04.1.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | | - dokumen | 0 | | | 1 dokumen (Perda/ Pergub) | 500.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|--------------------|
| 2.11.04.1.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | 1 dokumen | 150.000.000 |
| 2.11.04.1.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | 0 Ha | 0 | APBD | 18,5 Ha | 350.000.000 |
| 2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | | 100 % | 87.984.000 | | 100% % | 165.000.000 |
| 2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | | 5 perusahaan | 87.984.000 | | 6 perusahaan | 165.000.000 |
| 2.11.05.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | 1 dokumen | 0 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------------|--------------------------|--------------------|------|--|--------------------------|----------------------|
| 2.11.05.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya | Provinsi Jambi | 12 dokumen | 87.984.000 | APBD | | 22 dokumen | 165.000.000 |
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | | 79 % | 565.790.310 | | | 86 % | 1.490.000.000 |
| 2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | 75 usaha/kegiatan | 565.790.310 | | | 70 usaha/kegiatan | 1.490.000.000 |
| 2.11.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | Provinsi Jambi | 20 dokumen | 455.911.000 | APBD | | 20 dokumen | 350.000.000 |
| 2.11.06.1.01.0005 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | Provinsi Jambi | 36 orang | 2.744.600 | APBD | | 15 orang | 150.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|------|--|------------------------|--------------------|
| 2.11.06.1.01.0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | Provinsi Jambi | 75 badan usaha | 102.543.410 | APBD | | 80 badan usaha | 690.000.000 |
| 2.11.06.1.01.0007 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | Provinsi Jambi | 11 dokumen | 4.591.300 | APBD | | 11 dokumen | 300.000.000 |
| 2.11.07 | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | | 93 % | 210.000.000 | | | 100 % | 400.000.000 |
| 2.11.07.1.01 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui | | 31 MHA | 0 | | | 42 MHA | 250.000.000 |
| 2.11.07.1.01.0001 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Provinsi Jambi | 11 11 kab/kota | 0 | APBD | | 11 11 kab/kota dokumen | 250.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------|-----------------------|--------------------|------|--|-----------------------|--------------------|
| 2.11.07.1.02 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | | 31 kelembagaan | 210.000.000 | | | 42 kelembagaan | 150.000.000 |
| 2.11.07.1.02.0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | Provinsi Jambi | 2 dokumen | 210.000.000 | APBD | | 42 dokumen | 150.000.000 |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | | 80 % | 14.357.200 | | | 80% % | 600.000.000 |
| 2.11.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | | 5 kali | 14.357.200 | | | 5 kali | 600.000.000 |
| 2.11.08.1.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | 5 dokumen | 14.357.200 | APBD | | 5 dokumen | 500.000.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------|-------------------|-------------------|------|--|-------------------|----------------------|
| 2.11.08.1.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | | 0 orang | 0 | APBD | | 125 orang | 100.000.000 |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi | | 100 % | 0 | | | 100 % | 850.000.000 |
| 2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | | 6 kategori | 0 | | | 6 kategori | 850.000.000 |
| 2.11.09.1.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Provinsi Jambi | 6 entitas | 0 | APBD | | 6 entitas | 850.000.000 |
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | | 100% % | 71.319.610 | | | 100 % | 1.550.000.000 |
| 2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | | 18 kasus | 71.319.610 | | | 19 kasus | 1.550.000.000 |
| | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | | 11 kasus | | | | 28 kasus | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------|-------------------|------------------|-------------------|------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 2.11.10.1.01.0007 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani | Provinsi Jambi | 18 | pengaduan | 33.014.410 | APBD | | 19 | pengaduan | 550.000.000 |
| 2.11.10.1.01.0003 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | 11 | perkara | 34.089.700 | APBD | | 28 | perkara | 400.000.000 |
| 2.11.10.1.01.0005 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | 2 | perkara | 2.215.500 | APBD | | 15 | perkara | 400.000.000 |
| 2.11.10.1.01.0006 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Provinsi Jambi | 1 | perkara | 2.000.000 | APBD | | 4 | perkara | 200.000.000 |
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | | 30 | % | 26.825.000 | | | 30% | % | 400.000.000 |
| | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | | 70 | | | | | 70% | | |
| 2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | | 224.982,86 | ton/tahun | 26.825.000 | | | 224.982,86 | ton/tahun | 400.000.000 |
| | | Jumlah penanganan sampah secara regional | | 524.960,00 | ton/tahun | | | | 524.960,00 | ton/tahun | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------|---------------|-----------------------|------|--|----------------|-----------------------|
| 2.11.11.1.01.0009 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | Provinsi Jambi | 11 dokumen | 0 | APBD | | 11 dokumen | 100.000.000 |
| 2.11.11.1.01.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional | Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | Provinsi Jambi | 0 unit | 0 | APBD | | 1 unit | 100.000.000 |
| 2.11.11.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan | Provinsi Jambi | 0 dokumen | 0 | APBD | | 2 dokumen | 50.000.000 |
| 2.11.11.1.01.0006 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | Provinsi Jambi | 524.960,0 ton | 0 | APBD | | 524.960,00 ton | 50.000.000 |
| 2.11.11.1.01.0010 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Provinsi Jambi | 11 dokumen | 0 | APBD | | 11 dokumen | 50.000.000 |
| 2.11.11.1.01.0014 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Provinsi Jambi | 11 dokumen | 26.825.000 | APBD | | 11 dokumen | 50.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 35.347.536.000 |
| | | | | | 19.626.415.261 | | | | |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2025 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD dan Bank Dunia (Bio CF).

Hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I menunjukkan adanya beberapa kegiatan yang mengalami kekurangan anggaran dan perubahan indikator output/outcome menyesuaikan dengan Renstra yang sudah disusun. Sehubungan dengan beberapa alasan tersebut, maka tersusunlah perubahan rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

**TABEL 9
PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

| No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | PAGU RENJA MURNI (Rp) | PAGU PERUBAHAN RENJA (Rp) | SELISIH |
|------------|--|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | | (8) |
| | Dinas Lingkungan Hidup | | | 26.259.589.000 | 19.626.415.261 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | 26.259.589.000 | 19.626.415.261 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | 26.259.589.000 | 19.626.415.261 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Predikat AKIP Perangkat Daerah | BB (79,00) | 19.371.225.097 | 17.725.268.454 | (1.645.956.643) |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | 25 laporan/ dokumen | 759.600.600 | 91.941.500 | (667.659.100) |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 424.490.100 | 64.402.600 | (360.087.500) |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | 0 | (3.000.000) |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 dokumen | 3.000.000 | 0 | (3.000.000) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|------------|---|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 laporan | 98.754.650 | 9.517.650 | (89.237.000) |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 laporan | 224.355.850 | 12.021.250 | (212.334.600) |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 35 laporan/ dokumen | 16.340.066.674 | 15.802.145.829 | (537.920.845) |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 101 orang/ bulan | 16.322.066.674 | 15.797.145.829 | (524.920.845) |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 dokumen | 3.000.000 | 0 | (3.000.000) |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 14 laporan | 5.000.000 | 0 | (5.000.000) |
| I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 laporan | 148.720.000 | 12.232.000 | (136.488.000) |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 175 paket | 112.420.000 | 0 | (112.420.000) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 orang | 19.800.000 | 0 | (19.800.000) |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | 6.000.000 | 7.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 40 orang | 10.500.000 | 4.732.000 | (5.768.000) |
| I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 916.044.030 | 197.331.053 | (718.712.977) |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 24.953.530 | 9.981.412 | (14.972.118) |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 paket | 199.953.000 | 30.090.464 | (169.862.536) |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 400 paket | 79.550.000 | 10.760.000 | (68.790.000) |
| 4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 64.997.500 | 0 | (64.997.500) |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dokumen | 4.500.000 | 8.999.177 | 4.499.177 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 312.140.000 | 137.500.000 | (174.640.000) |
| 7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 laporan | 30.000.000 | 0 | (30.000.000) |
| 8 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 dokumen | 199.950.000 | 0 | (199.950.000) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| I.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 25 unit | 364.320.000 | 0 | (364.320.000) |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 unit | 235.320.000 | 0 | (235.320.000) |
| 2 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 unit | 111.000.000 | 0 | (111.000.000) |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 18.000.000 | 0 | (18.000.000) |
| 4 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 0 | 0 | 0 |
| I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 12 laporan | 630.764.393 | 1.601.818.072 | 971.053.679 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 surat | 3.000.000 | 600.000 | (2.400.000) |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 bulan | 449.999.593 | 398.331.672 | (51.667.921) |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 177.764.800 | 1.202.886.400 | 1.025.121.600 |
| I.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara | 14 unit | 211.709.400 | 19.800.000 | (191.909.400) |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 0 unit | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | 79.984.800 | 19.800.000 | (60.184.800) |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 unit | 74.955.000 | 0 | (74.955.000) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|-------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 0 unit | 56.769.600 | 0 | (56.769.600) |
| II | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 100 % | 636.931.200 | 40.839.400 | (596.091.800) |
| II.1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun | 0 dokumen | 252.519.200 | 0 | (252.519.200) |
| 1 | Penyusunan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun | 0 dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Penetapan RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi Jambi yang ditetapkan | 0 dokumen | 7.519.200 | 0 | (7.519.200) |
| 3 | Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali | 0 dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi | 0 dokumen | 245.000.000 | 0 | (245.000.000) |
| II.2 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | 12 dokumen | 384.412.000 | 40.839.400 | (343.572.600) |
| 1 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 0 dokumen | 4.856.000 | 0 | (4.856.000) |
| 2 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun | 1 dokumen | 2.600.000 | 0 | (2.600.000) |
| 3 | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | 11 dokumen | 245.000.000 | 40.839.400 | (204.160.600) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 4 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup yang disusun | 0 dokumen | 131.956.000 | 0 | (131.956.000) |
| III | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air (IKA) | IKA : 61,49 poin | 3.044.208.903 | 884.031.287 | (2.160.177.616) |
| | | Indeks Kualitas Udara (IKU) | IKU : 84,72 | | | |
| | | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) | IKAL : 79,14 | | | |
| | | Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) | IKEG : 75,39 | | | |
| III.1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 94 titik | 2.524.208.903 | 833.865.287 | (1.690.343.616) |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 6 dokumen | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) |
| 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 6 dokumen | 250.000.000 | 0 | (250.000.000) |
| 3 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut) | 6 lokasi | 355.236.000 | 49.074.700 | (306.161.300) |
| 4 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK | 2 dokumen | 250.000.000 | 0 | (250.000.000) |
| 5 | Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah | Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun | 1 dokumen | 37.314.000 | 0 | (37.314.000) |
| 6 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 480 dokumen | 1.531.658.903 | 784.790.587 | (746.868.316) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|--------------|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| III.2 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan | 10 lokasi | 520.000.000 | 50.166.000 | (469.834.000) |
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan | 12 dokumen | 315.000.000 | 25.077.800 | (289.922.200) |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kab/kota | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | 4 kegiatan | 205.000.000 | 25.088.200 | (179.911.800) |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | 0 Dokumen (Perda/ Pergub) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 0 dokumen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi | 0 Ha | 0 | 0 | 0 |
| V | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Perusahaan Transporter dan Perusahaan Pengumpul LB3) | 100 % | 164.799.600 | 87.984.000 | (76.815.600) |
| V.1 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi | 5 perusahaan | 164.799.600 | 87.984.000 | (76.815.600) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|-------------|---|---|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 dokumen | 14.800.000 | 0 | (14.800.000) |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 12 dokumen | 149.999.600 | 87.984.000 | (62.015.600) |
| VI | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 79 % | 1.269.680.200 | 565.790.310 | (703.889.890) |
| VI.1 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 75 usaha/kegiatan | 1.269.680.200 | 565.790.310 | (703.889.890) |
| 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | 20 dokumen | 325.000.000 | 455.911.000 | 130.911.000 |
| 2 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 36 orang | 150.000.000 | 2.744.600 | (147.255.400) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 75 | badan usaha | 544.680.200 | 102.543.410 | (442.136.790) |
| 4 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 11 | orang | 250.000.000 | 4.591.300 | (245.408.700) |
| VII | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 93 | % | 193.450.000 | 210.000.000 | 16.550.000 |
| VII.1 | Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui | 31 | MHA | 102.460.000 | 0 | (102.460.000) |
| 1 | Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 11 | dokumen | 102.460.000 | 0 | (102.460.000) |
| VII.2 | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 31 | kelembagaan | 90.990.000 | 210.000.000 | 119.010.000 |
| 1 | Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 2 | dokumen | 90.990.000 | 210.000.000 | 119.010.000 |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/ masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 80 % | 500.000.000 | 14.357.200 | (485.642.800) |
| VIII.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | 5 kali | 500.000.000 | 14.357.200 | (485.642.800) |
| 1 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 5 dokumen | 400.000.000 | 14.357.200 | (385.642.800) |
| 2 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 0 orang | 100.000.000 | 0 | (100.000.000) |
| IX | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Usulan Penghargaan LH untuk Masyarakat yang difasilitasi | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| IX.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 6 kategori | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 entitas | 0 | 0 | 0 |
| X | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif | 100 % | 432.814.000 | 71.319.610 | (361.494.390) |
| X.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 18 kasus | 432.814.000 | 71.319.610 | (361.494.390) |
| | | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 11 kasus | | | |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|-------------|--|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani | 18 pengaduan | 227.272.000 | 33.014.410 | (194.257.590) |
| 2 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 11 perkara | 67.824.000 | 34.089.700 | (33.734.300) |
| 3 | Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 2 perkara | 42.200.000 | 2.215.500 | (39.984.500) |
| 4 | Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 1 perkara | 95.518.000 | 2.000.000 | (93.518.000) |
| XI | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 30 % | 646.480.000 | 26.825.000 | (619.655.000) |
| | | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 70 | | | |
| XI.1 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | ton/tahun | 646.480.000 | 26.825.000 | (619.655.000) |
| | | Jumlah penanganan sampah secara regional | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi yang disusun dan ditetapkan | 11 dokumen | 220.360.000 | 0 | (220.360.000) |
| 2 | Pengoperasian dan Pemeliharaan fasilitas TPA/TPST Regional | Jumlah fasilitas TPA/TPST Regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik | 0 unit | 99.900.000 | 0 | (99.900.000) |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan | 0 dokumen | 55.500.000 | 0 | (55.500.000) |

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DLH PROVINSI JAMBI

TAHUN 2025

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4 | Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 524.960,00 ton | 112.160.000 | 0 | (112.160.000) |
| 5 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional | 11 dokumen | 9.990.000 | 0 | (9.990.000) |
| 6 | Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota | 11 dokumen | 148.570.000 | 26.825.000 | (121.745.000) |
| TOTAL | | | | 26.259.589.000 | 19.626.415.261 | |

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 mempedomani Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan lingkungan hidup yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI

Dr. H. VARIAL ADHI PUTRA, S.T., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196601052000121002